

DAFTAR PUSTAKA

KEPUSTAKAAN

- Angkasa. 2020. *Viktimologi*. Depok. Rajawali Pers.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*. Bandung. Widya.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. PT. Alumni.
- Arief, Barda Nawawi. 2000. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2001. *Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung (Kajian dari Aspek system Peradilan Pidana)*. Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Manajement di Mahkamah Agung R.I., dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung, F.H., UKSW, Salatiga. 1 Maret 2001.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta. Penerbit Bina Cipta.
- Dillah, Phillips dan Suratman. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Alfabeta.
- Faesar, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasinya*. Malang. Yayasan Asih Asah Asuh.
- Friedman, Lawrence M. 2018. *The Legal System. A Social Science Prespective*. Penerjemah M. Khozim. Bandung. Nusa Media.

- Hadjon, M. Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. PT.Bina Ilmu.
- Harahap, Yahya. 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penarapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Huberman, Michael dan B.Mathew Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Indarti, Erlin. 2003, *Diktat Diskresi Kepolisian*, Semarang: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Akademi Kepolisian.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung. Penerbit Nusa Media.
- Kemerntrian PPPA RI Deputi Bidang Perlindungan Anak. 2015. *Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Cetakan ke III Tahun 2015*.
- , 2016. *“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (duabelas) tahun. Cetakan ke 2*.
- Liebman, Miriam. 2007. *Restorative justice: How It Works*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Manan, Bagir. 2008, *Keadilan Restoratif (Suatu Pengenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Moeljatno.1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.
- , 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung. PT. Alumni.
- Mushadi. 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2007. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Semarang. Walisongo Mediation Center.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Rosidah, Nikmah. 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*. Semarang. Pustaka Magister.
- Sadjijono. 2008. *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*. Surabaya. Laksbang Mediatama.
- Soekanto, Soerjono. 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono.1993, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- , 2003. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rajawali.
- Soeparman, 2007, *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi*, Jakarta: Varia Peradilan, *Majalah Hukum Tahun Ke XXII*, No. 260, Juli 2007.
- Soesilo, R. 1974, *Taktik dan Teknik Penyidikan Kriminal*, Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Sutiyoso, Bambang. 2006. *Penyelesaian Sengketa Bisnis. Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*. Yogyakarta. Citra Media.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Meteriil*. Malang. UMM Press.
- Usman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.

Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta. Genta Publishing.

JURNAL

Abdullah, 2015, Gambaran Umum SPPA, Makalah disampaikan pada Diklat SPPA MA-RI, Bogor, 8-19 Juni 2015.

Amin, Rahman. 2020. Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat Di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat. *Krtha Bhayangkara*. Volume 14. Nomor 1. Januari-Juni 2020.

Angkasa dkk. 2009. Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Purwokerto). *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume IX. Nomor 3. September 2009.

----- dkk. 2021. Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal USM Law Review*. Volume 4. Nomor 1. 2021.

Angrayni, Lysa. 2016. Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Prespektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Respublica*. Volume 16. Nomor 1. Juni 2016.

Anzward, Bruce. Soleh. 2017. Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Dapat Memenuhi Rasa Keadilan Pihak Korban. *Jurnal De Facto*. Volume 4. Nomor 1. Juli 2017.

Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari. 2018. Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Al'Adl*. Volume X. Nomor 2. Juli 2018.

- Assa, Maharyani Italia. 2017, Kewenangan Penyidik dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut KUHP, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 10, No. 10, Desember 2017.
- Asshidiqie, Jimly. 2006, Pembangunan Hukum dan Penegakan hukum di Indonesia, pada seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Surabaya, 17 Februari 2006.
- Black, Donald J. 1972. The Boundaries of Legal Sociology. *The Yale Law Journal*. Volume 81. Nomor 6. 1972.
- Hartono, Bambang. 2016. Analisis Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Konteks *Ultimum Remedium* sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak. *Jurnal Pranata Hukum*. Volume 10. Nomor 2. Juli 2016.
- Madari, Muhammad Soma Karya. 2013. Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Cita Hukum*. Volume 1. Nomor 2. Desember 2013.
- Prayitno, Kwat Puji. 2012. Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto. *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume. 12. Nomor. 3. September 2012.
- Rudiantoro, Joko. 2014, Diskresi Kepolisian dalam Mengatasi Tindakan Anarki di Masyarakat, *Jurnal IUS*, Vol. II, No. 6, Desember 2014.
- Sitompul, D.P.M. 1993. Peranan Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 23. Nomor 6. Desember 1993.
- Sudjana, 2019, Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, *Jurnal Al Amwal*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2019.

- Tambir, I Made. 2019. Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Volume. 8. Nomor. 4. Desember 2019.
- Tanuwijaya, Christine dan Kristian. 2015. Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal Mimbar Justitia*. Volume. 1. Nomor. 02. Juli-Desember 2015.
- Widodo, Guntarto. 2016, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1, Maret 2016.
- Wiryawan dan Artha. 2015. Pengendalian Peredaran Gelap Narkotika oleh Narapidana dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Volume. 4. Nomor. 3. September 2015.
- Yudho, Winarno. 1987, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 17, No. 1, Februari 1987.
- Zulfa, Eva Achjani. 2016, Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Konflik Sosial: Kedudukan Peraturan Internal Kepolisian dalam Penanganan Konflik di dalam Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 4, Oktober 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang Undang no 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.